

Masyarakat Maluku Masih Tergolong Miskin

DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU

Senin, 20-November-2006

Masyarakat Maluku dinilai masih tergolong sebagai masyarakat miskin. Bahkan setelah beberapa kali terjadi pergantian pemimpin di provinsi ini, tidak ada program yang disusun oleh guna pengentasan kemiskinan yang mampu memecahkan masalah masyarakat tersebut. Bahkan, tingkat kemiskinan di Maluku meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disampaikan Sekretaris Fraksi Pembaharuan DPRD Maluku, Benhur G Watubun, kepada wartawan, Sabtu (18/11) kemarin di gedung DPRD Maluku.

Watubun mengatakan, kemiskinan ini sebagian besar disebabkan karena semakin menyempitnya lapangan pekerjaan. Bahkan kondisi ini lebih dipersulit dengan maraknya PHK oleh perusahaan-perusahaan lokal. Selain itu, karena program-program pengentasan kemiskinan yang disusun pemerintah daerah tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan program-program tersebut terkesan hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan penderitaan masyarakat kecil dan lemah ekonominya.

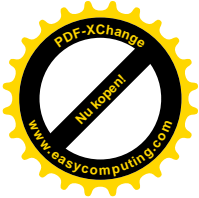
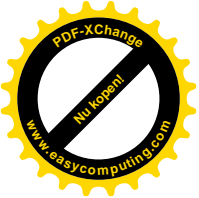
Seiring dengan tingkat kemiskinan itu, masyarakat pun mengalami beberapa kendala yang sangat memprihatinkan. Sebut saja, air bersih yang menjadi masalah krusial di beberapa kabupaten. Di Tual saja, daerah dekat dengan pusat informasi, masih saja ada kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati air bersih, bahkan karena mengkonsumsi air lokal ada masyarakat yang terserang muntaber dan penyakit gondok.

"Dengan kondisi seperti itu, apakah masyarakat Maluku memang sudah benar-benar mampu memposisikan diri untuk bersaing dengan masyarakat di provinsi lain, sebagaimana yang dicanangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Maluku?," tanyanya.

Bukan itu saja, masyarakat justru masih membutuhkan bantuan lain yang sifatnya urgen seperti jalan, jembatan, talud maupun korban bencana alam. Sehingga pemaparan ini mementahkan usulan pembangunan gedung DPRD Maluku yang baru.

Dia berharap agar dana daerah yang dialokasikan untuk pembangunan gedung DPRD segera dialihkan, karena gedung DPRD bisa kapan saja diperbaiki dan masih bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Pembangunan gedung DPRD yang baru bisa saja dilakukan, asalkan masyarakat Maluku sudah benar-benar keluar dari kemiskinan maupun masalah lain yang masih menggelutinya seperti masalah pengungsi maupun kesehatan.

Lantas kata dia, pemerintah daerah menunda pelaksanaan pembangunan tersebut dan mengalihkan dananya untuk hal lain, seperti peningkatan kesehatan dan pemecahan masalah pengungsi. Bukan itu saja, opini juga untuk menghilangkan image buruk tentang DPRD Maluku. "Masa kan kita bisa berada di gedung yang



mewah sementara sebagian besar masyarakat kita ada yang masih merasakan penderitaan? Pembangunan gedung DPRD Maluku kita minta ditunda saja dulu dan dananya kita gunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya. [M7D]
copyright © 2006 by DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU